BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebun Raya Bogor merupakan salah satu kebun raya nasional yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang sekarang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kebun Raya Bogor merupakan kebun botani tertua di Asia Tenggara yang menjadi bukti penting sejarah perkembangan ilmu pengetahuan alam di Indonesia. Kebun Raya Bogor sejatinya bukan hanya sekedar kebun botani, tetapi juga merupakan lingkungan hidup dan ruang sosial yang telah mengalami transformasi fungsi dan makna sejak masa pramodern hingga era modern.

Keberadaan Kebun Raya Bogor tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Kota Bogor. Kota Bogor dulunya dikenal dengan nama *dayeuh pakuan pajajaran*, pusat pemerintahan Kerajaan Sunda pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Pada masa itu, kawasan yang kini menjadi Istana Kepresidenan dan Kebun Raya Bogor dipercaya oleh Masyarakat Sunda Bogor sebagai *kabuyutan urang sunda*, dimana berdiri *keraton sri bima punta narayana madura suradipati* dan *leuweung samida*, sebuah hutan lindung atau taman kerajaan yang digunakan untuk keperluan spiritual dan ekologis. *Samida* mencerminkan hubungan kosmologis antara manusia, alam, dan kebudayaannya pada masa Kerajaan Sunda. Keruntuhan Kerajaan Sunda akibat ekspansi Kesultanan Banten pada tahun 1579 menandai fase transisi politik dan sosial yang penting di wilayah ini.

Memasuki masa kolonial, *dayeuh pakuan pajajaran* baru ditemukan kembali pada ekspedisi VOC ke pedalaman Priangan pada tahun 1687. Pada tahun 1703, Abraham van Riebeeck, Gubernur Jendral VOC (1709 – 1713) memimpin suatu misi untuk melakukan studi mendalam dari reruntuhan dan artefak-artefak Kerajaan Sunda. Pada ekspedisi tersebut, Riebeeck menemukan pemukiman masyarakat di bekas *dayeuh pakuan pajajaran*. Pemukiman tersebut dikenal sebagai Kampung Baru yang dipimpin oleh Letnan Tanujiwa, seorang Sunda Sumedang yang diutus oleh VOC memimpin wilayah ini pada tahun 1689. Pada 1705, setelah perjanjian dengan Kerajaan Mataram, wilayah ini resmi menjadi wilayah kekuasaan VOC, menjadi tanda awal terbentuknya kekuasaan kolonial di Bogor.

Pada tanggal 10 Agustus 1744, Gustaaf Willem Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC (1743-1750) memerintahkan pembangunan pesanggrahan bertingkat bergaya neoklasik mirip *Blenheim Palace* yang diberi nama Buitenzorg (artinya bebas masalah/kesulitan), yang pada saat ini dikenal sebagai Istana Kepresidenan Bogor. Pada 1745, Buitenzorg dan sembilan kampung di wilayah sekitarnya yaitu: Cisarua, Pondok Gede, Ciawi, Ciomas, Cijeruk, Sindang Barang, Balubur, Darmaga, dan Kampung Baru bergabung di bawah Kepala Kampung Baru yang bergelar demang, membentuk Afdeling Buitenzorg. Bogor kemudian berkembang sebagai kota administratif kolonial, didukung oleh pendirian pemukiman untuk pegawai VOC di sekeliling kawasan Buitenzorg.

Setelah Inggris menguasai Jawa selama 5 tahun sejak tahun 1811-1816, Letnan Gubernur Muda Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1811–1816) mengambil alih Buitenzorg sebagai kediamannya dan membangun

taman bergaya Inggris di belakang istana tersebut. Taman inilah yang menjadi cikal bakal kelahiran kembali *samida* sebagai kebun raya modern. Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1816-1818), Buitenzorg difungsikan sebagai tempat persinggahan Gubernur Jenderal ketika melakukan kunjungan dari Batavia ke Sukabumi atau Cianjur karena posisi geografisnya yang strategis. Di sekitar kediaman istana juga didirikan pemukiman orang-orang Belanda, dan sembilan pemukiman penduduk lokal menjadi satu kesatuan administratif.

Pada awal abad 19, pasca Perang Napoleon, Kekaisaran Belanda mengalami defisit anggaran karena kas negara yang kosong. Kekaisaran Belanda kemudian mengutus Caspar Georg Carl Reinwardt, seorang ahli botani Jerman ke Hindia Belanda untuk memetakan sumberdaya alam yang berpotensi menguntungkan di wilayah koloni. Pada tahun 1817, atas persetujuan Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1819–1826), Reinwardt mendirikan kebun botani dengan nama ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg, yang pada saat ini dikenal sebagai Kebun Raya Bogor. Pendirian Kebun Raya Bogor pada masa itu mencerminkan perhatian Kekaisaran Belanda pada sejarah alam dan harapan pada investasi pada institusi kebun raya ini akan menguntungkan. Melalui serangkaian peraturan perundang-undangan dan kebijakan kolonial, Kebun Raya Bogor dikembangkan sebagai pusat koleksi ilmiah berupa spesimen kering dan tumbuhan hidup dari seluruh nusantara dan penjuru dunia.

Pada perjalanannya, ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg mengalami pasang surut karena ketergantungannya pada sponsor pendanaan dan kebijakan politik kolonial. Seiring mulai dihapuskannya kebijakan tanam paksa dan berdirinya perkebunan besar milik swasta, kebun botani ini dijadikan sebagai institusi laboratorium dan pusat aklimatisasi tumbuhan untuk pengembangan perkebunan kolonial. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di tangan Melchior Treub, Kepala ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg yang visioner, kebun botani ini berkembang menjadi laboratorium pusat penelitian ilmiah yang termasyhur di kalangan ilmuwan dunia dan Departemen Pertanian Kolonial Hindia Belanda, yang bertanggungjawab atas pengembangan perkebunan kolonial serta pembangunan pertanian pribumi. Kebijakan politik etis tentang tanggungjawab moral pemerintah kolonial juga mendukung ideologi Treub tentang pengelolaan kebun raya yang *ilmiah* untuk perekonomian kolonial dan kesejahteraan pribumi.

Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 1949, pengelolaan ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan Kusnoto Setyodiwiryo sebagai Kepala Kebun Raya pertama dari Indonesia. Kebun botani ini kemudian berganti nama menjadi Kebun Raya Indonesia atau kemudian lebih dikenal sebagai Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor pada awalnya dikelola oleh Djawatan Penyelidikan Alam (DPA) kemudian silih berganti mulai dari Lembaga Pusat Penyelidikan Alam (LPPA), Lembaga Biologi Nasional (LBN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan kini oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Berbagai unit kerja bagian dari Kebun Raya Bogor

dengan fungsi khusus juga melepaskan diri dan berkembang menjadi lembaga yang berdiri sendiri di kemudian hari.

Transformasi Kebun Raya Bogor dari *samida* yang bersifat kosmologis dan spiritual menjadi 's Lands Plantentuin te Buitenzorg hingga Kebun Raya Bogor BRIN yang ilmiah dan administratif menunjukan intervensi manusia (penguasa) yang sangat signifikan di kawasan ini. Kerajaan Sunda, Pemerintah Kolonial, hingga Pemerintah Republik Indonesia merupakan aktor dominan, yang berperan sebagai kontributor dalam perubahan lingkungan fisik dan penerima manfaat dari pemanfaatan sumberdaya alam di Kebun Raya Bogor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebun Raya Bogor merupakan lingkungan yang dipolitisasi sebagaimana konsep utama pada teori *Third World Political Ecology* oleh Bryant & Bailey (1997:26).

Meskipun pengelolaan Kebun Raya Bogor sebagai lingkungan yang dipolitisasi didominasi oleh penguasa, masyarakat lokal tidak sepenuhnya tersingkir dari ruang ini. Pada masa antara keruntuhan Kerajaan Sunda di *dayeuh pakuan pajajaran* dan sebelum pemberlakuan kebijakan *wijkenstelsel* pada 1835, Masyarakat Sunda Bogor membangun perkampungan dan lahan pertanian di kawasan Kebun Raya Bogor. Bahkan setelah masyarakat lokal disingkirkan dari kawasan Kebun Raya Bogor oleh kebijakan *wijkenstelsel,* mereka terus berupaya mempertahankan legitimasi mereka atas ruang tersebut melalui klaim peninggalan leluhur yang berwujud makam keramat, yang sekarang dikenal sebagai Situs Makam Keramat Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi.

Legitimasi Masyarakat Sunda Bogor di ruang tersebut juga ditunjukan oleh memori kolektif dan kepercayaan yang mengklaim bahwa Kawasan Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor merupakan kelanjutan dari peninggalan *keraton sri bima punta narayana madura suradipati* dan *leuweung samida.* Selain sebagai upaya melawan marginalisasi, klaim tersebut dapat dilihat sebagai upaya Masyarakat Sunda Bogor untuk mempertahankan identitas kesundaannya dengan melestarikan lingkungan dan budaya peninggalan leluhurnya. Memori kolektif dan kepercayaan Masyarakat Sunda Bogor tentang Kebun Raya Bogor masih hidup di beberapa kalangan, dibuktikan oleh reproduksi narasi kesundaan dan tradisi ziarah ke makam keramat yang masih dijalankan hingga saat ini.

Di bawah kekuasaan rezim kolonial, masyarakat lokal sebenarnya juga dilibatkan dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor, meskipun hanya sebagai pekerja. Pada masa kolonial, mereka terlibat sebagai petugas kebersihan, keamanan, dan pembantu para ilmuwan staf Kebun Raya Bogor. Namun, hubungan ini berlangsung dalam konteks kekuasaan kolonial yang hirarkis, yang mengabaikan peran dan kontribusi masyarakat lokal serta meminggirkan kepercayaan dan pengetahuan lokal yang telah hidup sebelumnya dalam sejarah Kebun Raya Bogor.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Kelsey (2024: 540): *Usaha botani kolonial bukan hanya tentang mengoleksi tumbuhan; tetapi juga terkait erat dengan proyek-proyek produksi, dominasi, dan kontrol pengetahuan yang lebih luas. Para ahli botani kolonial mengambil alih pengetahuan botani pribumi tanpa pengakuan, menafsirkannya kembali melalui kacamata ilmu pengetahuan dan*

taksonomi Eropa. Masyarakat Pribumi seringkali terdegradasi ke peran informan pasif atau buruh dalam pengumpulan dan tanaman budidaya dan sistem pengetahuan tradisional kita terpinggirkan atau diambil alih oleh otoritas kolonial.

Di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia, mayoritas pejabat dan ilmuwan staf Kebun Raya Bogor adalah Warga Negara Indonesia. Meskipun demikian kepercayaan dan pengetahuan lokal Masyarakat Sunda Bogor masih terpinggirkan dalam praktik kuratorial Kebun Raya Bogor. Pemerintah Republik Indonesia mewarisi narasi kolonial dan model pengelolaan Kebun Raya Bogor yang ilmiah dan terpusat berbasis epistemologi barat dibanding mengembangkan narasi lokal dan mengadopsi model pengelolaan kolaboratif, melibatkan partisipasi Masyarakat Sunda Bogor beserta kepercayaan dan pengetahuan lokal yang mereka miliki.

Pada perkembangannya, negara mulai menunjukan upaya untuk mengapresiasi memori kolektif dan kepercayaan masyarakat lokal tentang Kebun Raya Bogor yang selama ini terpinggirkan melalui serangkaian kebijakan di tingkat daerah. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor menetapkan Kompleks Makam Keramat Ratu Galuh Mangku Alam sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kota Bogor. Menurut Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Bogor, kebijakan Pemerintah Kota Bogor kala itu belum sesuai dengan ketentuan proses penetapan Registrasi Nasional Cagar Budaya.

Hal dapat dimaklumi karena pada masa itu, TACB Kota Bogor belum dibentuk dan peraturan perundang-undangan di tingkat Kota Bogor yang mengatur tentang

cagar Budaya belum dirancang. Registrasi Daerah Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Cagar Budaya baru berlaku pada tahun 2019 dan TACB Kota Bogor baru terbentuk pada tahun 2023. Meskipun demikian upaya ini dinilai sebagai upaya elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bogor kala itu untuk mengapresiasi memori kolektif dan kepercayaan lokal serta melindungi kompleks makam keramat tersebut.

Sebelumnya Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kota Bogor Sebagai Kota Pusaka. Peraturan ini menjadikan berbagai peninggalan bersejarah di Kebun Raya Bogor sebagai bagian dari Bogor Kota Pusaka. Peraturan ini menetapkan *Heritage Tree* yang ada di Kebun Raya Bogor sebagai Pusaka Alam, *Heritage Building* sebagai Pusaka Ragawi dan Kompleks Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor sebagai Pusaka Saujana. Namun dalam peraturan tersebut, Kompleks Makam Keramat Ratu Galuh Mangku Alam di Kebun Raya Bogor tidak termasuk sebagai bagian dari Bogor Kota Pusaka.

Upaya Pemerintah Kota Bogor dalam melestarikan Kebun Raya Bogor sebagai cagar budaya kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Cagar Budaya sebagai penjabaran teknis-operasional di tingkat daerah Kota Bogor untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Bogor kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Bogor No. 430.45-674 Tahun 2020 Tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Kebun Raya Bogor sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kota Bogor.

Sebelum Kebun Raya Bogor ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota Bogor, sebenarnya telah muncul inisiatif dan dukungan oleh pihak elemen masyarakat untuk mengusulkan Kebun Raya Bogor sebagai *World Heritage Site* ke UNESCO. Pengusulan tersebut kemudian dikelola secara mandiri sejak tahun 2017 oleh LIPI, selaku pengelola Kebun Raya Bogor. LIPI dan Pemerintah Kota Bogor menargetkan Kebun Raya Bogor menjadi *World Heritage Site* pada tahun 2020. Pada tanggal 25 Juni 2018, Kebun Raya Bogor telah diajukan ke *UNESCO World Heritage Centre* oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Namun, hingga saat ini Kebun Raya Bogor masih berada di *tentative list.* Pada perkembangannya, upaya pengajuan Kebun Raya Bogor sebagai *World Heritage Site* mulai mengakomodasi narasi lokal tentang Kebun Raya Bogor di masyarakat. Upaya tersebut menunjukan upaya negara dalam mengapresiasi memori kolektif dan kepercayaan lokal, meskipun masyarakat belum dilibatkan secara kolaboratif dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor yang berasaskan pengetahuan lokal.

Upaya Masyarakat Sunda Bogor dalam mendapatkan pengakuan atas memori kolektif dan kepercayaan lokal tentang Kebun Raya Bogor kemudian memasuki babak baru, dengan kehadiran swasta di Kebun Raya Bogor. Pada tahun 2020, LIPI selaku pengelola Kebun Raya Bogor menjalin kemitraan dengan PT. Dyandra Promosindo untuk mengelola empat kebun raya LIPI, yaitu: Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Bali. PT. Dyandra Promosindo merupakan unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang pengelolaan konservasi alam meliputi pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pendidikan dan pemanfaatan kawasan konservasi. Dalam menjalankan

kemitraan ini, PT. Dyandra Promosindo kemudian membentuk PT. Mitra Natura Raya (PT. MNR). PT. MNR menjalankan operasional kebun raya dan fungsi eduwisata, sehingga riset dan unit riset LIPI dapat fokus menjalankan fungsi riset dan konservasi tanpa dibebani urusan operasional. Pada perkembangannya, LIPI dan seluruh lembaga penelitian nasional dilebur ke BRIN melalui Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 sehingga Kebun Raya Bogor kemudian menjadi infrastruktur riset dan inovasi milik BRIN sebagai Kawasan Konservasi Ilmiah (KKI).

Pada agustus 2021, PT. MNR memperkenalkan GLOW (*Glomerous Light of Wonderfull*) sebagai program baru di Kebun Raya Bogor yang bertujuan memperkenalkan beragam tumbuhan kepada generasi milenial dan menghilangkan kesan Kebun Raya Bogor yang menyeramkan di malam hari melalui spot-spot yang instagramable. GLOW merupakan program atraksi wisata malam berupa lampu-lampu dan proyeksi cahaya pada pohon-pohon di Kebun Raya Bogor. GLOW terdiri dari enam zona diantaranya: Taman Pandan, Taman Meksiko, Taman Akuatik, Lorong Waktu, Taman Astrid, dan Taman Ecodome.

Pada perkembangannya, keberadaan pihak PT.MNR dan proyek GLOW kemudian memicu kontroversi di masyarakat. Berbagai pihak dari elemen masyarakat muncul ke permukaan untuk menolak keberadaan pihak swasta dan menuntut proyek GLOW dihentikan. Perlawanan dari pihak elemen masyarakat dimulai pada 20 september 2021, saat lima orang mantan kepala Kebun Raya Bogor mengirimkan surat berjudul *Menjaga Marwah Kebun Raya Bogor* yang ditujukan pada pihak PT. MNR, BRIN dan para pemangku kebijakan di Kota Bogor. Surat

ini berisi masukan kepada pihak pengelola untuk menjaga marwah kebun raya dengan meninjau kembali rencana GLOW, dan mengevaluasi kerjasama BRIN dengan PT.MNR dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor untuk mendukung pengusulan Kebun Raya Bogor sebagai *World Heritage Site*.

Perlawanan berbagai elemen masyarakat kemudian terus berlanjut dan berkembang semakin kompleks. Berbagai pihak dari elemen Masyarakat Kota Bogor bahkan masyarakat Jawa Barat kemudian aktif melakukan aksi demonstrasi di lapangan dan di media dalam menyuarakan penolakannya pada keberadaan PT. MNR di Kebun Raya Bogor dan menuntut Pemerintah Kota Bogor menutup GLOW. Muncul nama-nama LSM seperti Pemuda Sunda Menggugat, Masyarakat Peduli Cagar Budaya, Aliansi Komunitas Budayawan Jawa Barat, Forum Peduli Kebun Raya dan Majelis Dzikir RI 1. Menurut pihak elemen masyarakat, program GLOW dinilai tidak mempertimbangkan dampak ekologis pada ekosistem Kebun Raya Bogor dan dampak sosial-budaya pada nilai kesakralan Kebun Raya Bogor beserta kompleks makam keramat di dalamnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini, Pemerintah Kota Bogor kemudian mengadakan berbagai acara rapat audiensi untuk mewadahi aspirasi dari berbagai pihak dari elemen masyarakat dan mencari solusi bersama pihak pengelola Kebun Raya Bogor. Tuntutan dari berbagai elemen masyarakat serta pertimbangan dari hasil kajian cepat dari LPPM IPB University, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan surat pernyataan sikap penolakan operasional GLOW di sebagian kawasan Kebun Raya Bogor. Langkah ini kemudian dilanjutkan oleh penutupan sementara GLOW oleh PT. MNR untuk kebutuhan riset kolaborasi BRIN dengan

LPPM IPB University untuk mengkaji dampak GLOW pada hewan dan tumbuhan di ekosistem Kebun Raya Bogor.

PT. MNR akhirnya bekerjasama Majelis Dzikir RI-1 menyelenggarakan silaturahmi bersama seluruh elemen Masyarakat Kota Bogor di Kebun Raya Bogor. Inisiatif ini akhirnya menghasilkan kesepahaman dan kesepakatan untuk menghentikan operasional GLOW dan PT. MNR menyatakan bahwa pihaknya siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pasca konflik, PT. MNR terus melakukan upaya rekonsiliasi dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Kota Bogor dan elemen masyarakat. PT. MNR melakukan kerjasama dengan Aliansi Komunitas Budayawan untuk mengadakan program Budaya Sunda. PT. MNR juga melakukan silaturahmi ke Pemerintah Kota Bogor untuk mensinergikan *event* di Kebun Raya Bogor dalam kalender pariwisata Kota Bogor yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor.

Pasca kegagalan GLOW, PT. MNR kemudian juga menghadirkan program baru pengganti GLOW di Kebun Raya Bogor dan tiga kebun raya BRIN yang dikelolanya. PT. MNR menghadirkan program konser musik di kebun raya bernama *Sunset di Kebun* sebagai program unggulan. Program ini menawarkan pengalaman menonton pertunjukan musik di tengah keindahan alam terbuka kebun raya saat matahari terbenam. Beberapa program yang ditawarkan antara lain: *Intimate Music Show*, *Eksplorasi Musik, Lesstari, Conservation, Culture* dan *Natura.* PT. MNR juga menghadirkan kesenian tradisional pada program *Sunset di Kebun* dengan bekerjasama dengan sanggar kesenian lokal.

Transformasi fungsi dan makna Kebun Raya Bogor sebagai ruang spiritual-ekologis, ruang konservasi-ilmiah hingga ruang interaksi sosial yang kompleks sejak masa prakolonial hingga era modern mencerminkan bagaimana visi dan kepentingan penguasa dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor. Kerajaan Sunda melihat *samida* sebagai ruang spiritual-ekologis yang berfungsi sebagai hutan lindung konservasi yang digunakan untuk keperluan spiritual dan ekologis. Pemerintah Kolonial melihat 's Lands Plantentuin te Buitenzorg sebagai ruang konservasi-ilmiah yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan birokrasi ilmiah yang bertujuan memenuhi kepentingan ekonomi politik kolonial. Pemerintah Republik Indonesia melihat Kebun Raya Bogor sebagai infrastruktur riset dan inovasi yang berfungsi menyelenggarakan lima pilar kebun raya yaitu penelitian, konservasi, edukasi, wisata dan jasa lingkungan serta menghasilkan pendapatan negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dari sejarah panjang hubungan masyarakat, penguasa dan Kebun Raya Bogor Dapat dipahami bahwa relasi kekuasaan yang tidak setara telah menempatkan masyarakat pribumi sebagai aktor akar rumput yang terpinggirkan. Pemerintah Kolonial mengambil alih *samida*, mendirikan Buitenzorg, merelokasi pemukiman masyarakat dan membangun Kebun Raya Bogor sebagai kebun botani modern dan institusi ilmiah-birokratis untuk tujuan ilmiah dan ekonomi politiknya. Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih Buitenzorg dan 's Lands Plantentuin te Buitenzorg kemudian menjadikannya Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor. Pada perkembangnya di bawah pengelolaan BRIN, PT. MNR masuk sebagai mitra swasta dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor, membuka peluang

komersialisasi Kebun Raya Bogor melalui efisiensi operasional dan optimalisasi fungsi eduwisata.

Seiring pengelolaan Kebun Raya Bogor oleh Pemerintah Kolonial hingga Pemerintah Republik Indonesia, praktik kuratorial kebun ini didominasi oleh epistemologi barat sehingga pengetahuan lokal (etnobotani) Masyarakat Sunda Bogor juga terpinggirkan dan terlupakan. Meskipun struktur kekuasaan berubah seiring pergantian zaman dan penguasa, Kebun Raya Bogor sebagai kawasan yang memiliki nilai sakral, tidak sepenuhnya kehilangan maknanya bagi Masyarakat Sunda Bogor. Beberapa situs di kawasan ini, termasuk kompleks makam keramat dan mata air, tetap dihormati oleh penduduk sekitar dan menjadi bagian dari praktik budaya dan spiritual masyarakat hingga saat ini.

Konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor antara masyarakat dan pengelola Kebun Raya Bogor yang terjadi pada tahun 2021-2022 juga menunjukan bagaimana masyarakat sebagai aktor yang selama ini terpinggirkan mulai melakukan perlawanan kepada para aktor tradisional, seperti negara dan swasta. Berbagai elemen masyarakat yang terhimpun dalam LSM-LSM yang memiliki keorganisasian yang kompleks telah mengubah persamaan kekuasaan lebih jauh dan mengancam kekuasaan aktor-aktor tradisional. LSM-LSM mampu membangun kesadaran publik dan gerakan massa sehingga menyulitkan negara dan swasta mengontrol masyarakat dan sumberdaya.

Dalam konteks ini, hubungan antara masyarakat dan Kebun Raya Bogor serta konflik yang menyertainya menjadi penting untuk dikaji menurut antropologi ekologi karena masalah tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika berbagai

kepentingan kekuasaan, dan negosiasi berbagai aktor di Kebun Raya Bogor. Konflik antara masyarakat, pengelola dan pemerintah kota juga memunculkan isu yang lebih besar tentang masalah apresiasi budaya dan lingkungan. Masalah budaya yang dimaksud adalah marginalisasi dan kurangnya apresiasi negara pada memori kolektif dan kepercayaan lokal dalam upaya pelestarian Kebun Raya Bogor sebagai *cagar alam* serta kurang konsistennya kebijakan Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Republik Indonesia pada kebijakan pelestarian Kebun Raya Bogor sebagai cagar budaya.

Dengan demikian, latar belakang historis dan sosial-budaya ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana Kebun Raya Bogor bukan hanya situs ekologis dan ilmiah, tetapi juga situs budaya dan ruang sosial yang sarat makna bagi Masyarakat Kota Bogor dari masa ke masa. Masyarakat tidak hanya berposisi sebagai pengguna ruang, tetapi juga sebagai pemilik makna historis dan kultural terhadap Kebun Raya Bogor. Namun, dalam praktiknya, posisi masyarakat masih rentan terhadap marginalisasi dan pengabaian dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, analisis antropologis terhadap hubungan antara masyarakat, penguasa dan Kebun Raya Bogor menjadi penting untuk membongkar dinamika sosial-politik yang tersembunyi di balik Kebun Raya Bogor sebagai ruang publik kontemporer.

Menurut LPPM IPB University (2021), masalah lingkungan yang dimaksud adalah di Kebun Raya Bogor resiko ancaman penurunan biodiversitas akibat proyek GLOW. Sebelum kehadiran GLOW, Kebun Raya Bogor juga telah menghadapi menghadapi masalah internal, seperti penurunan koleksi pohon tua dan spesies

hewan yang menghuninya. Menurut Indresputra et al. (2023), sejumlah delapan ratus delapan puluh lima (885) pohon rentan tumbang, dengan tiga ratus lima puluh delapan (358) pohon memiliki probabilitas tinggi untuk tumbang disebabkan hama seperti rayap, penggerek kayu, cuaca badai, dan faktor usia. Disebabkan hilangnya jalur hijau yang biasanya digunakan oleh burung untuk hinggap dan berpindah, populasi dan spesies burung di Kebun Raya Bogor juga sangat berkurang. Kerusakan ini telah menyebabkan korban jiwa yang tertimpa pohon tumbang, kerugian materil mencapai miliaran rupiah karena properti yang rusak dan kerugian immaterial karena koleksi pohon-pohon penting yang sudah tua. Selain itu, kerusakan pepohonan menyebabkan turunnya populasi kelelawar di Kebun Raya Bogor.

Dengan melihat persoalan Kebun Raya Bogor dalam konteks lokal yang sarat dengan sejarah lisan yang bersumber dari memori kolektif dan pengetahuan lokal Masyarakat Sunda Bogor, penting pula untuk memahami bagaimana sejarah kebun raya di dunia dan posisi kebun raya saat ini dalam konteks global. Menurut Botanic Gardens Conservation International (BGCI), kebun kaya atau kebun botani adalah lembaga umum yang menyimpan koleksi tanaman hidup yang terawat baik untuk tujuan penelitian ilmiah, konservasi, pameran, dan pendidikan (Sawalha, 2022). Menurut Sawalha (2022), kebun botani berbeda dari cagar alam, dimana tanaman asli liar ditanam untuk konservasi dan nilai ekonomis lainnya. Kebun botani terdiri dari berbagai spesies dari berbagai ekosistem di kawasan lanskap yang terbatas sehingga menciptakan kumpulan spesies unik yang tidak akan pernah ditemukan di lingkungan alami. Kebun raya juga dibedakan dari taman umum dalam banyak hal.

Taman umum ditujukan untuk pertunjukan umum, sedangkan kebun raya ditujukan untuk pameran spesimen hidup dan kering, serta ekowisata di lokasi lanskap. Jenis kegiatan keduanya melibatkan publik, tetapi kebun raya menyelenggarakan acara yang lebih terorganisasi, ilmiah, dan budaya.

Menurut Sawalha (2022) Pembangunan kebun botani sudah ada sejak lama di peradaban Yunani, Romawi, Arab, dan Islam. Namun kebun botani yang lebih maju dan terkelola dengan baik baru muncul pada abad terakhir. Menurut Speck & Speck (2023), kebun raya pertama modern pertama kali didirikan di Eropa untuk mempelajari tanaman obat, tanaman beracun, dan tanaman herbal oleh mahasiswa kedokteran atau farmasi di universitas. Seiring dengan semakin pentingnya ilmu pengetahuan alam pada abad ke-19, kebun raya juga berperan sebagai lembaga pendidikan publik. Selama paruh kedua abad ke-20, kebun raya juga difokuskan pada kebutuhan akan konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan sebagai sumber makanan dan obat-obatan.

Menurut Wondafrash et al. (2021), institusi kebun raya saat ini harus bertransformasi mengingat telah terjadi dalam penurunan keanekaragaman hayati serta peningkatan kerugian ekonomi akibat hama dan patogen invasif dalam skala global. Oleh karena itu, kebun raya harus bertransformasi dari pusat botani ekonomi dan konservasi tanaman menjadi pusat penelitian biosekuriti dan kesehatan tanaman. Kebun raya dapat berperan dalam deteksi dini hama dan patogen invasif. Namun disisi lain, kebun raya juga bisa menjadi titik penyebaran hama akibat aktivitas rutin seperti perpindahan tanaman dan kunjungan publik.

Sejalan dengan Wondafrash et al. (2021), Ren & Antonelli (2023) berpendapat, kebun raya terutama kebun raya nasional saat ini berperan sebagai garis terdepan konservasi tanaman global. Mengingat kekayaan informasi yang disimpan dalam koleksi hidup dan keahlian di antara para anggota stafnya, kebun raya nasional dapat memainkan peran yang khas dalam membantu memecahkan tantangan lingkungan dan sumber daya yang dihadapi dunia. Kebun raya nasional bertanggung jawab untuk mencegah hilangnya spesies tanaman dan keanekaragaman genetik, degradasi ekosistem alam lebih lanjut, menyadarkan masyarakat akan nilai keanekaragaman tanaman dan ancaman yang dihadapinya, serta melakukan tindakan konkret untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kebun raya nasional dapat memainkan peran sinergis antara komitmen nasional dan konvensi internasional. Oleh karena itu, Kebun raya nasional harus memiliki perspektif internasional dengan fokus pada pengembangan kemitraan dan koordinasi kepentingan nasional dan internasional. Kebun raya nasional dapat memberikan saran kepada pemerintah tentang rencana aksi keanekaragaman hayati nasional dan undang-undang khusus (Ren & Antonelli, 2023).

Menurut Sawalha (2022), kebun raya pada abad ke-21 diperkirakan akan mengatasi masalah yang melampaui batas-batas kebun dengan menangani tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai pendorong misi utama. Oleh karena itu, BGCI telah mengembangkan kerangka Global Strategy for Plant Conservation (2022–2030). Strategi ini mengkoordinasikan upaya konservasi, restorasi, dan pemanfaatan keanekaragaman tumbuhan global; dan kemitraan di tingkat

internasional, regional, dan nasional untuk merumuskan dan mendukung kebijakan konservasi internasional dan memperkuat kapasitas konservasi tumbuhan global (Ren & Antonelli, 2023). Selama beberapa dekade terakhir, kebun raya telah menjadi lembaga utama yang melaksanakan konservasi keanekaragaman tanaman secara *eks-situ* dan memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan konservasi *in-situ* (Ren & Antonelli, 2023).

Menurut Ren et al. (2022), saat ini terdapat sekitar 4.500 kebun raya di dunia. Lebih dari 80 kebun raya tersebut diantaranya merupakan kebun raya nasional di 43 negara. Indonesia sendiri memiliki empat kebun raya nasional, yaitu Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Bali. Namun Indonesia sendiri belum memiliki institusi khusus pengelola kebun raya nasional seperti Amerika Serikat dan Australia (Widyatmoko, 2019).

Menurut (Ren & Antonelli, 2023), saat ini kebun raya nasional di negara-negara berpendapatan tinggi yang sedang dalam proses penguatan penelitian cenderung berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati dan pendidikan lingkungan yang komprehensif. Sebaliknya, kemampuan riset kebun raya nasional di negara-negara berpendapatan rendah seringkali belum sekuat itu. Oleh karena itu, negara-negara berpendapatan rendah membutuhkan investasi, dukungan finansial, dan kolaborasi yang tepat untuk melindungi tanaman langka dan terancam punah sambil menyebarluaskan temuan ilmiah kepada publik dan memperkuat pemanfaatan tanaman ekonomi di negara mereka.

Pada perkembangannya saat ini, persepsi publik terhadap kebun raya sering kali lebih berfokus pada aspek rekreasi dan fasilitas, sebagaimana ditunjukkan dalam

penelitian Catahan & Woodruffe-Burton (, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Faustin & Claude (Faustin & Claude, 2023) di sektor Bwishyura, Karongi, Rwanda yang menemukan minat publik yang tinggi untuk mengunjungi kebun botani, terutama untuk piknik dan hiburan. Di sisi lain, ekowisata di kebun raya mulai diakui sebagai model yang dapat mengakomodasi keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial, seperti yang terlihat di Kebun Raya Purwodadi (Yogaswara et al., 2021).

Penelitian terdahulu tentang kebun raya oleh Yogaswara et al. (2021), Berliandaldo et al. (2021), Faustin & Claude (2023) serta penelitian lainnya telah telah menguraikan beberapa saran dalam pengelolaan kebun raya. Saran-saran tersebut diantaranya: membangun jaringan sosial, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, menghadirkan inovasi sosial, menggunakan teknologi informasi dan melibatkan pengetahuan lokal. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam konservasi tanaman dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dan inklusif.

Dengan demikian, persoalan yang melingkupi Kebun Raya Bogor dapat dipahami melalui dua dimensi utama, yakni dimensi lokal dan global. Pada dimensi lokal, Kebun Raya Bogor tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan kontemporer yang memperlihatkan adanya ketegangan antara Masyarakat Sunda Bogor dengan aktor dominan, baik negara maupun swasta. Ketegangan ini berakar pada marginalisasi partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor serta pengabaian memori kolektif dan kepercayaan lokal Masyarakat Sunda Bogor tentang Kebun Raya Bogor.

Sementara itu, pada dimensi global, kebun raya secara umum menghadapi tantangan yang semakin kompleks berupa krisis biodiversitas, penyebaran hama dan patogen invasif, serta tuntutan untuk bertransformasi menjadi pusat penelitian biosekuriti, konservasi, dan pendidikan publik. Namun demikian, persepsi masyarakat luas terhadap kebun raya masih cenderung terbatas pada fungsinya sebagai ruang rekreasi dan fasilitas wisata, sehingga nilai ekologis, historis, maupun kultural yang melekat di dalamnya kerap terabaikan. Negara, khususnya Pemerintah Republik Indonesia sebagai aktor pelindung sekaligus pengguna sumber daya kebun raya, juga menunjukkan kecenderungan serupa dengan lebih menekankan aspek komersialisasi dan pariwisata ketimbang mengapresiasi kekayaan alam dan nilai budaya yang terintegrasi dalam kebun raya. Orientasi semacam ini berpotensi memperlemah fungsi utama kebun raya sebagai institusi konservasi dan penelitian, serta berimplikasi pada semakin terpinggirkannya relasi sosial-ekologis yang historis dimiliki oleh masyarakat lokal.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh terbatasnya kajian antropologis, khususnya dalam perspektif antropologi ekologi di Indonesia, yang secara kritis menelaah hubungan antara masyarakat lokal, kebun raya dan warisan kolonial. Sejauh penelusuran peneliti hingga bulan juli 2025, hanya ada dua penelitian antropologi yang membahas tentang hubungan antara masyarakat lokal dan kebun raya yaitu Boehi (2021) dan Nielsen (Nielsen, 2025). Keduanya mengeksplorasi bagaimana kebun botani menampilkan narasi kolonial yang eropasentris dan epistemologi barat dalam praktik kuratorialnya sehingga meminggirkan narasi prakolonial dan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat adat.

Penelitian Boehi (2021) yang berjudul *Radical Stories in The Kirstenbosch National Botanical Garden: Emergent Ecologies Challenges to Colonial Narratives and Western Epistemologies* pada jurnal *Environmental Humanities* Volume 15 Nomor 1, mengeksplorasi bagaimana ekologi yang muncul (*emergent ecologies*) di Kebun Raya Nasional Kirstenbosch menantang narasi kolonial dan epistemologi Barat yang selama ini mendominasi representasi alam dan sejarah di institusi tersebut. Dengan pendekatan antropologi lingkungan yang berpadu dengan teori *multispecies ethnography*, penulis menerapkan metode etnografis seperti observasi partisipatif, studi arsip, dan analisis narasi material yang terwujud dalam hubungan manusia-tumbuhan-hewan. Temuan utama mengungkap bahwa praktik kuratorial dan narasi visual di Kirstenbosch selama ini menutupi sejarah kekerasan kolonial, namun kehadiran organisme seperti pohon almond liar, fungi *Armillaria*, dan tanaman hibrida justru memperlihatkan potensi ekologis untuk mendestabilisasi warisan kolonial tersebut dari dalam. Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada gagasan bahwa kebun raya dapat menjadi ruang dekolonial melalui cerita-cerita radikal yang mengakar pada interaksi multispesies, yang membuka kemungkinan baru dalam memahami tata kelola lingkungan dan epistemologi non-Barat.

Nielsen (2025) yang berjudul *Public Presentations of Plants: Colonial Legacies and Indigenous Perspectives in the Botanical Gardens of The Huntington* pada jurnal *Museum Anthropology* mengeksplorasi bagaimana Kebun Botani Huntington di California menampilkan koleksi tanaman kepada publik dalam kerangka warisan kolonial serta sejauh mana perspektif masyarakat adat diintegrasikan ke dalam

narasi kuratorial. Dengan pendekatan antropologi museum, penelitian ini menggunakan metode etnografi berupa observasi lapangan, wawancara dengan staf kuratorial dan hortikultura, serta analisis teks pada papan informasi dan pameran. Temuan utama menunjukkan bahwa narasi publik di Huntington masih sangat eropasentris dan mengabaikan konteks kolonial, sementara inisiatif dekolonisasi baru mulai muncul melalui penggunaan nama-nama *Indigenous* dan pameran seni *Borderlands* yang melibatkan perspektif adat. Secara teoritis, studi ini berkontribusi pada antropologi museum dan antropologi lingkungan dengan menegaskan bahwa kebun botani bukan hanya ruang konservasi ilmiah, tetapi juga arena politik pengetahuan dimana relasi kuasa kolonial terus direproduksi sekaligus dapat ditantang melalui praktik kuratorial dekolonial.

Kondisi ini juga diperkuat oleh terbatasnya kajian antropologis, khususnya dalam perspektif antropologi ekologi di Indonesia, yang secara kritis menelaah dinamika hubungan antara masyarakat lokal, negara, bisnis, LSM dan aktor lainnya dalam pengelolaan kebun raya atau kawasan konservasi eks-situ lainnya serta kawasan cagar budaya, dalam kasus Kebun Raya Bogor. Mayoritas kajian antropologi ekologi pada awalnya berfokus pada harmoni hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hidup, tanpa melihat posisi masyarakat di sistem ekonomi-politik yang lebih luas pada skala global-lokal. Oleh karena itu, menurut Delfi & Oktayanty (2022), ekologi politik sebagai metodologi dalam antropologi kritis berperan dalam menganalisis problematika lingkungan pada skala global-lokal.

Penelitian Delfi & Oktayanty (2022) yang berjudul *Akses dan Eksklusi dalam Reformasi Hutan di Sumatera: Studi Kasus di Nagari Simanau, Kecamatan Tigo*

Lurah, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* Volume 24 Nomor 2, merupakan salah satu penelitian yang menggunakan ekologi politik sebagai metodologi dalam antropologi kritis. Delfi & Oktayanty (2022) menganalisis reformasi hutan nagari di Nagari Simanau, khususnya menelusuri aktor-aktor yang mendapat dan tidak mendapat manfaat dari proses kekuasaan politik dalam reformasi hutan tersebut. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan metode antropologis berupa observasi lapangan, wawancara mendalam (kepada pengelola hutan nagari, warga lokal, aparatur nagari, dll.), dan studi pustaka. Hasil temuan utama menunjukkan bahwa reformasi hutan nagari di Simanau justru menimbulkan dilema akses: akses ke hutan tetap dibatasi bagi masyarakat non-pengelola, sehingga konsep akses digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapat manfaat hutan, sementara konsep eksklusi mencegah kelompok tertentu memperoleh akses hutan. Dengan kata lain, meskipun program hutan nagari diharapkan mengatasi deforestasi dan kemiskinan, dalam praktiknya ia memperkuat kontrol kelompok pengelola (LSM pendamping dan aparat lokal) yang menentukan siapa boleh atau tidak boleh memanfaatkan hutan.

Kajian ekologi politik saat ini hanya berfokus pada masalah lingkungan atau pengelolaan sumberdaya di lingkungan alamiah yang dikonsepsikan sebagai kawasan konservasi *in-situ* oleh negara dan sebagai kawasan adat oleh masyarakat lokal. Tema sentral yang dibahas biasanya berkaitan penghidupan masyarakat yang terancam oleh kebijakan konservasi atau proyek pemerintah dan bisnis. Menurut Bryant & Bailey (1997:184-185), bidang ekologi politik perlu diperluas melampaui

fokus gaya antropologisnya pada permasalahan pengelolaan lahan agar tetap relevan dengan dinamika konflik politik-ekologi di Dunia Ketiga. Perlu perhatian yang lebih besar terhadap topik ekologi politik perkotaan, masalah perubahan kualitas tanah, air atau udara yang relatif terabaikan.

Penelitian ini berasumsi bahwa negara dan swasta saat ini tidak lagi hanya berfokus pada kebijakan konservasi atau proyek di lingkungan alamiah yang dikonsepsikan sebagai kawasan konservasi *in-situ* oleh negara atau sebagai kawasan penghidupan oleh masyarakat lokal. Pada kasus penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor yang berlangsung pada tahun 2021-2022, mencerminkan tren yang baru berkembang belakangan ini dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya. Tren yang dimaksud yaitu, perluasan wilayah operasional kebijakan dan proyek negara dan mitra swastanya ke lingkungan buatan, yang dikonsepsikan negara sebagai kawasan cagar budaya atau kawasan konservasi eks-situ dalam bentuk kebun raya, kebun binatang, hutan kota dan taman wisata.

Penelitian ini berasumis bahwa Kebun Raya Bogor merupakan salah satu kawasan konservasi eks-situ sekaligus kawasan cagar budaya yang menjadi wilayah operasional baru bagi kebijakan negara dan proyek mitra swastanya. Dengan menggunakan pendekatan ekologi politik pada kasus Kebun Raya Bogor, penelitian ini menaruh perhatian yang lebih besar terhadap topik ekologi politik perkotaan serta ekologi politik lingkungan buatan seperti kawasan konservasi ex-situ dan kawasan cagar budaya yang relatif terabaikan. Penelitian ekologi politik ini juga melampaui fokus gaya antropologisnya pada permasalahan pengelolaan lahan agar

tetap relevan dengan dinamika hubungan ekologi-politik di negara dunia ketiga seperti Indonesia.

Peneliti berasumsi bahwa dinamika hubungan ekologi-politik di Kebun Raya Bogor sebagai lingkungan yang dipolitisasi, telah berlangsung sejak zaman prakolonial hingga saat ini. Lingkungan ini telah dibentuk dan dieksploitasi oleh penguasa dan masyarakat di sekitarnya dari zaman ke zaman sebagai *samida*, Kampung Bogor, 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, Kebun Raya Indonesia, hingga Ekowisata GLOW. Saat ini Kebun Raya Bogor telah bertransformasi menjadi lingkungan, dimana berbagai kepentingan aktor dipertemukan.

PT. MNR, BRIN dan Pemerintah Kota Bogor diduga memiliki kepentingan ekonomi-politik dalam model bisnis ekowisata kebun raya, sedangkan elemen masyarakat memiliki kepentingan sosial-budaya dalam konteks ritual dan identitas kesukubangsaan. IPB University memiliki kepentingan ilmiah dan konservasi untuk kegiatan pendidikan dan penelitian sivitas akademika. Namun, para aktor tersebut diduga kurang menyadari bahwa Kebun Raya Bogor juga merupakan aktor alam, non-manusia yang berperan penting dalam memberikan jasa ekologis dan merekonstruksi budaya masyarakat di sekitar kawasan ini, termasuk Masyarakat Sunda Bogor, Masyarakat Timur Asing (Cina dan Arab), serta Masyarakat Eropa (terutama Belanda) hingga Masyarakat Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah

Kebun Raya Bogor merupakan ruang yang unik dalam melihat hubungan manusia dengan lingkungan serta kekuasaan aktor atas aktor lain dalam

pengelolaan lingkungan dan sumberdaya. Berbagai masalah fisik dan non-fisik yang menyertai Kebun Raya Bogor mencerminkan hubungan yang kompleks antara ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Penelitian ini berfokus pada konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor pada rentang tahun 2020-2025. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh penelitian ini:

1. Bagaimana dinamika berbagai aktor dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor sebagai medan kontestasi berbagai kepentingan?
2. Mengapa elemen masyarakat, terkhususnya Masyarakat Sunda Bogor sebagai aktor akar rumput yang dimarginalisasikan oleh negara sejak era kolonial, saat ini melakukan perlawanan terhadap aktor-aktor tradisional dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana dinamika berbagai aktor dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor sebagai medan kontestasi berbagai kepentingan
2. Menganalisis mengapa elemen masyarakat, terkhususnya Masyarakat Sunda Bogor sebagai aktor akar rumput yang dimarginalisasikan oleh negara sejak era kolonial, saat ini melakukan perlawanan terhadap aktor-aktor tradisional dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat akademis penelitian ini yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang Kebun Raya Bogor sebagai kebun dan institusi dari sisi sosio-politis dan

mengembangkan apresiasi pada Kebun Raya Bogor sebagai ruang budaya-spiritual, sosial, dan alam. Melalui perspektif ini, pembaca dapat memahami bahwa pengelolaan lingkungan hidup Kebun Raya Bogor beserta masalah yang menyertainya tidaklah bersifat apolitis dan tidak bisa dipisahkan dari konteks ekonomi politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya penelitian di bidang antropologi ekologi dan ekologi politik dan membuka jalan bagi penelitian selanjutnya mengenai kawasan konservasi ex-situ dan di indonesia kawasan cagar budaya seperti kebun raya.

Melalui pemahaman holistik pada hubungan yang kompleks antara sains-konservasi, ekonomi-politik dan sosial-budaya di Kebun Raya Bogor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong lebih banyak dukungan publik untuk menjaga marwah kebun raya. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan dan program pengelolaan Kebun Raya Bogor yang lebih efektif, efisien, berkelanjutan, partisipatif dan inklusif. Bagi swasta, penelitian ini diharap dapat menjadi masukan dalam merumuskan strategi bisnis ekowisata kebun raya yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada konservasi, edukasi, dan kepentingan publik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian di bidang antropologi ekologi dan ekologi politik pada beberapa tahun terakhir kebanyakan berfokus pada dinamika hubungan antara masyarakat

lokal, negara, bisnis, LSM dan aktor lainnya dalam masalah lingkungan dan pengelolaan sumberdaya. Lokus penelitian biasanya berfokus pada kawasan alamiah yang dikonsepsikan sebagai kawasan konservasi *in-situ* oleh negara dan sebagai kawasan adat oleh masyarakat lokal. Tema sentral yang dibahas biasanya berkaitan penghidupan masyarakat yang terancam oleh kebijakan konservasi atau proyek oleh pemerintah dan bisnis.

Penelitian Mostafanezhad & Evrard (2021) yang berjudul *Chronopolitics Of Crisis: A Historical Political Ecology Of Seasonal Air Pollution In Northern Thailand* pada jurnal Jurnal Geoforum Volume 21, membahas bagaimana Pemerintah Thailand membuat narasi krisis yang menyalahkan petani kecil di dataran tinggi atas krisis polusi udara musiman di Thailand Utara yang disebabkan oleh pembakaran biomassa pertanian. Para petani kecil merupakan aktor yang paling terdampak secara sosial ekonomi dan narasi tersebut justru semakin memperburuk marginalisasi sosial dan ekonomi mereka. Penelitian Banos et al. (2023) yang berjudul *From Edenic Island to Endemic Park: A Historical Political Ecology of Environmental Degradation Narratives on Réunion (West Indian Ocean)* pada *Journal of Historical Geography,* juga menemukan kasus serupa dimana narasi degradasi lingkungan di Pulau Reunion telah berkembang dari masa kolonial hingga saat ini, sering kali menyalahkan penduduk dataran tinggi dan menciptakan ketidaksetaraan sosial-spasial.

Penelitian lainnya di bidang ekologi politik membahas bagaimana negara telah menerima mewariskan kolonialisme berupa masalah ekologis dan sosial akibat perubahan penggunaan lahan untuk tujuan pembangunan atau pertanian. Penelitian

Mukherjee (2022) yang berjudul *Living Systems Infrastructure Of Kolkata: Exploring Co-Production Of Urban Nature Using Historical Urban Political Ecology* pada jurnal *Environment & Urbanization* Volume 34 Nomor 1, membahas bagaimana intervensi kolonial dan pascakolonial telah mengubah *East Kolkata Wetlands* dari marsh asin menjadi lahan basah yang dipenuhi air limbah. Sementara itu penelitian Siman & Niewiarowski (2023) yang berjudul *Historical Political Ecology As Qualitative Social-Ecological System Analysis In The Maumee River Watershed pada jurnal Ecology and Society* Volume 28 Nomor 1, membahas transformasi DAS Maumee dari rawa alami menjadi lahan pertanian industri sejak masa kolonial, telah memperburuk kualitas air. Sementara itu penelitian Haines (2021) yang berjudul *Shaping Landscapes: Environmental History, Plantation Management and Colonial Legacies in Mauritius* pada jurnal *International Journal of Historical Archaeology* Volume 29, membahas sistem perkebunan gula kolonial di Bras d'Eau Mauritius yang mewariskan masalah sosial berupa ketidaksetaraan rasial dan dampak lingkungan yang bertahan hingga kawasan tersebut menjadi taman nasional.

Selain itu, praktik pengelolaan lingkungan hidup oleh negara yang bersifat sentralistik, ilmiah dan kapitalistik warisan dari kolonialisme juga telah melestarikan dan memperburuk masalah ekologis dan sosial tersebut di kemudian hari. Praktik pengelolaan lingkungan hidup tersebut sebagian besar berujung pada ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya dan konflik sosio-politik. Penelitian Montero-Rosado et al (2023) yang berjudul *Historical Political Ecology In The Former Lake Texcoco: Hydrological Regulation* pada jurnal *Land* Volume 12

Nomor 5, mengungkap kebijakan pengeringan danau Danau Texcoco untuk pertanian dan urbanisasi. Kebijakan tersebut telah menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk hilangnya sumber makanan, erosi tanah, dan polusi udara.

Peluso (1992) pada buku *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java,* menyoroti praktik pengelolaan hutan yang sangat terpusat yang dijalankan pada masa kolonial oleh Dinas Kehutanan Kolonial diwariskan hingga masa Orde Baru oleh Perum Perhutani di Jawa. Negara memonopoli sistem pengelolaan hutan dan meminggirkan masyarakat lokal. Hutan dijadikan aset negara melalui klaim legitimasi kehutanan ilmiah (*scientific forestry*). Hak-hak adat, praktik lokal, dan akses masyarakat desa terhadap hutan secara sistematis dihapuskan dan pengetahuan lokal dianggap sebagai tidak rasional.

Pascakolonialisasi, masyarakat sebagai aktor yang terpinggirkan mulai melakukan perlawanan pada aktor tradisional. Perlawanan sehari-hari historis dan kontemporer dari aktor ini dijelaskan oleh Scott (1985) dan Peluso (1992). Scott (1985) adalah Ilmuwan politik dan antropolog Amerika yang mengkhususkan diri dalam politik komparatif. Ia melakukan studi kasus di Desa Sedaka, Malaysia, yang mengalami modernisasi pertanian dan ketimpangan sosial. Scott menunjukkan bagaimana petani kecil dan buruh tani melawan dominasi elite lokal tanpa melakukan konfrontasi terbuka. Mereka melakukan perlawanan diam-diam, tersembunyi, dan tidak terorganisir seperti: sabotase kecil-kecilan, penggelapan hasil, pura-pura tidak tahu, bekerja lambat, gosip, ejekan, dan sindiran terhadap elit atau majikan.

Peluso (1992) seorang sosiolog pedesaan Amerika yang terinspirasi oleh pendekatan James C. Scott tentang *everyday forms of resistance*, mengembangkan konsep tersebut pada konteks perhutanan di Jawa. Peluso memperlihatkan bahwa masyarakat desa di sekitar hutan di Jawa tidak pasif dalam menghadapi dominasi negara. Mereka melakukan berbagai bentuk perlawanan sehari-hari yang tidak selalu bersifat terbuka atau revolusioner. Bentuk perlawanan tersebut antara lain: penebangan liar, pencurian kayu dan hasil hutan, pemanfaatan hutan secara sembunyi-sembunyi, retorika dan legitimasi Lokal melalui narasi moral, dan aliansi diam dengan pejabat kehutanan yang memiliki hubungan sosial dan simpati terhadap kondisi masyarakat. Peluso menyebut ini sebagai bentuk *resistance through illegal use*, yakni perlawanan melalui penggunaan sumber daya secara tidak sah menurut hukum negara, tapi sah menurut norma lokal.

Sementara itu, Friedmann & Rangan (1993) dalam bukunya yang berjudul In *Defense of Livelihood: Comparative Studies on Environmental Action,* menyoroti bagaimana konflik lingkungan kontemporer sering kali menggabungkan bentuk perlawanan terselubung (*everyday resistance*) dengan kampanye publik terbuka yang dimediasi oleh organisasi akar rumput. Salah satu studi kasus utamanya adalah konflik di Narmada Valley, India, dimana proyek pembangunan bendungan Sardar Sarovar mengancam penghidupan masyarakat lokal. Pada awalnya, warga melakukan aksi diam-diam seperti menolak relokasi dan tetap bertani di lahan proyek, namun kemudian bertransformasi menjadi gerakan terbuka melalui organisasi akar rumput *Narmada Bachao Andolan* yang melancarkan kampanye publik, demonstrasi, dan advokasi internasional.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ekologi politik lebih sering menyorot masalah lingkungan dan pengelolaan lahan masyarakat tradisional dan masyarakat pedesaan. Konflik sering yang disorot oleh para ahli ekologi politik biasanya berbasis masalah penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, Bryant & Bailey (1997:184), menyarankan, ekologi politik perlu diperluas melampaui fokus gaya antropologisnya pada permasalahan pengelolaan lahan agar tetap relevan dengan dinamika konflik politik-ekologi yang terus berubah di Dunia Ketiga. Bidang penelitian ekologi politik yang berfokus pada masalah perubahan kualitas tanah, air atau udara perlu dikembangkan.

Selain itu, Menurut Bryant & Bailey (1997:185), dalam konteks urbanisasi yang pesat di negara dunia ketiga, mereka juga menyarankan perhatian yang lebih besar terhadap topik ekologi politik perkotaan yang relatif terabaikan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperbaiki bias pedesaan yang sudah lama ada dalam ekologi politik melalui penelitian mengenai perubahan dan konflik lingkungan perkotaan. Jika ditelaah lebih lanjut, konflik politik lingkungan yang sering disorot oleh para ahli ekologi politik biasanya berbasis masalah lingkungan alamiah seperti hutan yang berada di kawasan penghidupan masyarakat dan kawasan konservasi *in-situ* milik negara. Oleh karena itu, topik ekologi politik perkotaan yang berbasis masalah lingkungan kawasan konservasi ex-situ di seperti kebun raya relatif terabaikan.

Sementara itu menurut penelitian Classens (2015), yang berjudul *The Nature of Urban Gardens: Toward a Political Ecology of Urban Agriculture* pada jurnal *Agriculture and Human Values* Volume 32 Nomor 2, para akademisi yang

mengkaji kebun raya cenderung menyoroti aspek positif dan mendepolitisasi dinamika ekonomi-politik, sosial-budaya dan ekologi kebun raya yang kompleks. Oleh karena itu, menurut Classens (2015), pendekatan ekologi politik, mampu melihat ketidaksetaraan struktural yang hadir dalam ruang-ruang ini sebagai arena perlawanan dan pemberdayaan dan menganalisis praktik material dan diskursif alam dalam pengelolaan kebun raya.

Berikut beberapa beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan ekologi politik dalam mengkaji kebun raya dan lanskap sejenisnya. Beberapa penelitian telah mengungkap dinamika berbagai aktor dan marginalisasi masyarakat atau kelas sosial dalam pengelolaan kebun raya di dunia. Penelitian Gabriel (2016) yang berjudul *No Place For Wilderness: Urban Parks And The Assembling Of Neoliberal Urban Environmental Governance* pada jurnal Urban Forestry and Urban Greening Volume 19 Nomor 1, menemukan Taman Fairmount di Philadelphia bukan hanya ruang alami yang berfungsi sebagai tempat rekreasi. Proses neoliberalisasi tata kelola perkotaan telah menciptakan arena kontestasi politik di kebun kota. Dalam arena tersebut, berbagai aktor dan pemangku kepentingan menegosiasikan, makna dan visi mereka mengenai pengelolaan taman tersebut.

Sementara itu, penelitian Boehi (2021) yang berjudul *Radical Stories in The Kirstenbosch National Botanical Garden: Emergent Ecologies Challenges to Colonial Narratives and Western Epistemologies* pada jurnal *Environmental Humanities* Volume 13 Nomor 1, membahas marginalisasi pengetahuan lokal dalam pengelolaan *Kirstenbosch National Botanical Garden*, dimana praktik

kuratorialnya lebih menekankan epistemologi Barat dan hanya memediasi pengetahuan lokal secara terbatas melalui etnobotani. Sementara itu penelitian Temby (2023) yang berjudul *Municipal Parks Versus Glorious Gardens: The Tensions of Inter-Governmental Management of Urban Park Space*, menyoroti konflik ekologi politik taman kota di Brisbane. Kurangnya kerjasama antara pemerintah lokal dan negara bagian serta ketimpangan akses taman kota antara warga kelas menengah dan masyarakat yang dianggap tidak terhormat telah menghambat pembangunan taman kota sebagai ruang publik yang inklusif.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada dinamika berbagai aktor pada konflik ekologi politik di Kebun Raya Bogor. Namun sejauh penelusuran peneliti, hingga saat ini belum ada penelitian di bidang ekologi politik yang membahas tentang Kebun Raya Bogor. Dalam 20 tahun terakhir penelitian mengenai Kebun Raya Bogor kebanyakan berasal dari disiplin ilmu sejarah, biologi, botani, arsitektur, tata ruang, pariwisata dan manajemen. Penelitian terdahulu yang mengulik sisi sosial-budaya Kebun Raya Bogor secara mendalam sangatlah kurang Sedangkan penelitian terdahulu yang mengulik sisi ekonomi-politik Kebun Raya Bogor kebanyakan berasal dari disiplin ilmu sejarah. Penelitian tersebut membahas sejarah kebun dan institusi Kebun Raya Bogor, sejarah ilmu pengetahuan alam, sejarah botani, sejarah pertanian, dan sejarah konservasi alam di Hindia Belanda. Berikut beberapa ulasan beberapa penelitian terdahulu tentang Kebun Raya Bogor yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian Weber (2018) yang berjudul *A Garden As A Niche: Botany And Imperial Politics In The Early Nineteenth Century Dutch Empire* pada jurnal

Studium Volume 11 Nomor 3, menemukan bahwa pemerintah kolonial menganggap Kebun Raya Bogor sebagai alat penting untuk mengembangkan Hindia Belanda menjadi wilayah yang menguntungkan dalam jangka panjang melalui survei intensif dan kebijakan ekspansionis. Penelitian Weber (2019) kemudian yang berjudul Collecting Colonial Nature: European Naturalists And The Netherlands Indies In The Early Nineteenth Century pada jurnal *Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden* Volume 134 Nomor 3, menemukan setelah mendirikan Kebun Raya Bogor, Kekaisaran Belanda kemudian membentuk *Natuurkundige Commissie voor Nederlandsch-Indië* (Komite Sejarah Alam Hindia Belanda) untuk membantu pemerintah kolonial dalam mengelola sumber daya alam di Hindia Belanda. Komisi ini bermarkas di Kebun Raya Bogor sebagai pusat operasional bagi para naturalis yang diberi infrastruktur penelitian lapangan dan pengiriman spesimen ke eropa. Posisinya yang dekat dengan pusat administrasi kolonial membantu koordinasi antara peneliti dan pemerintah kolonial (Weber, 2019).

Menurut penelitian Wille (2015) yang berjudul *The Coproduction Of Station Morphology and Agricultural Management in The Tropics: Transformations in Botany at The Botanical Garden at Buitenzorg, Java 1880–1904,* pada akhir abad ke-19 terjadi transformasi institusi Kebun Raya Bogor dari kebun botani tradisional menjadi pusat penelitian ilmiah dan agrikultur. Menurut penelitian Weber & Wille (2018) yang berjudul *Laborious Transformations: Plants and Politics at the Bogor Botanical Gardens* pada jurnal *Studium* Volume 11 Nomor 3, transformasi ini ditandai oleh pendirian laboratorium baru dan kerjasama dengan laboratorium

swasta. Transformasi ini juga memengaruhi kepala dan staf Kebun Raya Bogor yang memainkan peran kunci dalam jaringan perdagangan dan pertukaran spesimen global.

Menurut penelitian Boomgaard (2006) yang berjudul *The Making and Unmaking of Tropical Science: Dutch research on Indonesia, 1600-2000* pada *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* Volume 162 Nomor 2, dan penelitian Weber (2014) yang berjudul *Bitter Fruits Of Accumulation: The Case Of Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854)* pada jurnal *History of Science* Volume 52 Nomor 3, setelah transformasi tersebut, Kebun Raya Bogor berkembang pesat sebagai pusat penelitian dan aklimatisasi tanaman domestik dan asing untuk eksploitasi sektor perkebunan yang penting dalam ekonomi kolonial. Kebun Raya Bogor mendapat dukungan finansial dari pemerintah kolonial dan industri perkebunan swasta. Menurut penelitian Van der Hoogte & Pieters (2013) yang berjudul *From Javanese Coca to Java coca: An Exemplary Product of Dutch Colonial Agro-Industrialism, 1880-1920* pada jurnal *Technology and Culture* Volume 54 Nomor 1, Kebun Raya Bogor bekerjasama dengan laboratorium pertanian pemerintah dan swasta yang dipimpin oleh ilmuwan terlatih universitas untuk mengeksploitasi tanaman komoditas tropis. Pada masa itu, Kebun Raya Bogor sebagai pusat penelitian telah menjadi bagian dari sistem agro-industri kolonial yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dan teknologi.

Menurut Weber & Wille (2018), transformasi ini mencerminkan perubahan dalam kebijakan politik dan ekonomi kolonial. Pemanfaatan Kebun Raya Bogor mencerminkan kepentingan ekonomi dan politik dalam pengelolaan sumber daya

alam di wilayah koloni (Boomgaard, 2008). Menurut Weber (2018), Di saat yang bersamaan, Kebun Raya Bogor telah menjadi ceruk sementara dimana berbagai pihak dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam berkumpul untuk merundingkan hubungan antara botani dan politik imperial.

Menurut penelitian Gibran et al (2024) yang berjudul *Institusi Lands Plantentuin Buitenzorg menjadi Departement Van Landbouw dalam Visi Treub (1880-1905)* pada Jurnal Pendidikan dan Peneliti Sejarah Volume 7 Nomor 1, pada awal abad ke-20 Kebun Raya Bogor bertransformasi dari kebun tradisional menjadi *Departement van Landbouw* (Departemen Pertanian). Transformasi ini tidak lepas dari kepemimpinan Treub di Kebun Raya Bogor dan konteks kepentingan kolonial. Menurut Wille (2015), institusi Kebun Raya Bogor sebagai departemen negara pada masa ini memiliki pengaruh politik memperkuat kebijakan kolonial di Hindia Belanda.

Menurut penelitian Goss (2018) yang berjudul *Reinventing The Kebun Raya In The New Republic: Scientific Research At The Bogor Botanical Gardens In The Age Of Decolonization* pada jurnal Studium Volume 11 Nomor 3, institusi Kebun Raya Bogor terus bertransformasi mengikuti situasi ekonomi politik pada masanya. Pada krisis ekonomi global akibat depresi ekonomi 1930-an, ilmuwan staf Kebun Raya Bogor beralih dari penelitian botani ekonomi ke penelitian botani murni. Selama pendudukan Jepang, para ilmuwan staf Kebun Raya Bogor berfokus pada penelitian taksonomi umum serta sejarah botani Indonesia atas perintah Jepang.

Selama revolusi Indonesia, ilmuwan Indonesia berupaya membuka peluang baru mereka untuk memimpin penelitian, meskipun ada upaya dari pihak Belanda

untuk mempertahankan kontrol ilmiah (Goss, 2018). Pada masa dekolonisasi, Kebun Raya Bogor bertransformasi menjadi pusat ilmu pengetahuan Indonesia yang independen (Weber & Wille, 2018). Menurut penelitian Goss (2023) yang berjudul Decolonizing Botany: Indonesia, UNESCO, and the Making of a Global Science pada Journal of the History of Biology Volume 56 Nomor 3, dekolonisasi menciptakan peluang baru bagi para ilmuwan staf Kebun Raya Bogor dan pejabat Indonesia untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan nasional dengan jaringan global. Dekolonisasi juga membuka kolaborasi penelitian ilmiah internasional di Indonesia, khususnya dalam bidang botani yang telah berkembang sejak lama di Kebun Raya Bogor.

Menurut Weber (2014), Kebun Raya Bogor tidak dapat didirikan dan dikelola tanpa dana, otoritas, dan jaringan dari pemerintah kolonial. Oleh karena itu, para ilmuwan staf Kebun Raya Bogor pada abad ke-19 bahkan hingga saat ini sangat bergantung pada dukungan negara dalam penelitiannya. Para ilmuwan rela menerima jabatan sebagai birokrat kolonial karena kepastian jenjang karir yang stabil dan kemudahan akses infrastruktur milik negara untuk kepentingan penelitian. Selain mengemban tugas administratif untuk kepentingan politik ekonomi negara, mereka melakukan penelitian untuk kepentingan ilmiah. Wille (2018) menunjukan bagaimana Kebun Raya Bogor dimanfaatkan oleh para ilmuwan sebagai *hotspot* untuk transformasi baru dalam biologi. Menurut Goss (2009), pada akhirnya sains dan penelitian yang berkembang di Kebun Raya Bogor digunakan untuk mendukung upaya eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah kolonial.

Menimbang ekologi politik adalah studi transdisipliner yang berkembang sebagai bagian dari kritik terhadap ekologi budaya dalam antropologi. Pengaruh antropologi tak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan, banyak gagasan awal dalam ekologi politik lahir dari refleksi para antropolog terhadap bagaimana masyarakat lokal berinteraksi dengan lingkungan mereka dalam konteks relasi kuasa yang lebih luas.

Tokoh-tokoh seperti Roy Rappaport, Marvin Harris, hingga Eric Wolf telah membuka jalan dengan menekankan pentingnya melihat praktik ekologi masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih besar. Dalam perkembangannya, ekologi politik memperluas cakupan analisis ini dengan menyoroti bagaimana kekuasaan negara, kapitalisme global, serta rezim pengetahuan mempengaruhi akses, kontrol, dan distribusi sumber daya alam. Pendekatan ini tidak hanya mengkritisi pendekatan ekologi budaya yang cenderung ahistoris dan terlalu lokalistik, tetapi juga memberi ruang untuk membaca resistensi, konflik, dan dinamika kontestasi di tingkat lokal sebagai bagian dari proses politik yang kompleks.

Kontribusi Roy Rappaport terhadap ekologi politik berakar dari pendekatannya dalam ekologi budaya yang memandang hubungan antara manusia dan lingkungan sebagai sistem yang saling terkait melalui mekanisme sosial dan ritual. Dalam karyanya *Pigs for the Ancestors* (1968), ia menganalisis bagaimana masyarakat Tsembaga Maring di Papua Nugini mengatur populasi babi, konflik antar kelompok, dan penggunaan sumber daya melalui ritual keagamaan (Rappaport, 1968). Meskipun belum eksplisit memuat analisis kekuasaan atau struktur politik

yang lebih luas, karya Rappaport membuka jalan bagi pemahaman bahwa praktik budaya memiliki peran ekologis nyata, suatu pondasi penting bagi pendekatan ekologi politik yang kemudian menambahkan dimensi historis dan relasi kuasa dalam analisisnya.

Marvin Harris, melalui pendekatan materialisme budaya, mengembangkan gagasan bahwa budaya manusia pada dasarnya dibentuk oleh kondisi material seperti teknologi, lingkungan, dan kebutuhan ekonomi. Dalam *Cows, Pigs, Wars, and Witches* (1974) dan *Cultural Materialism* (1979), Harris menjelaskan bahwa banyak praktik budaya, termasuk larangan religius atau ritual, memiliki fungsi rasional dalam konteks ekologis dan ekonomi (Harris, 1974). Harris memberikan kontribusi penting bagi ekologi politik dengan menekankan pentingnya kondisi material dan ekologis dalam membentuk struktur sosial, meskipun pendekatannya sering dikritik karena determinisme ekologis dan kurangnya perhatian pada konflik sosial dan dinamika kekuasaan. Namun demikian, karyanya mendorong lahirnya analisis yang menghubungkan ekologi dengan struktur produksi dan distribusi sumber daya.

Sementara itu, Eric Wolf memberikan kontribusi yang lebih langsung dan eksplisit terhadap pondasi ekologi politik dengan membawa dimensi sejarah, kolonialisme, dan kekuasaan global ke dalam studi masyarakat dan lingkungan. Dalam *Europe and the People Without History* (1982), Wolf mengkritik pandangan antropologis yang melihat masyarakat lokal sebagai entitas terisolasi dan ahistoris. Ia menunjukkan bahwa masyarakat adat dan petani kecil selalu terhubung dengan proses sejarah dunia melalui kolonialisme, perdagangan global, dan ekspansi

kapitalisme. Bagi Wolf, konflik sumber daya dan perubahan lingkungan tidak bisa dipahami tanpa melihat struktur kekuasaan dan hubungan global yang lebih luas (Wolf, 1982). Pendekatan historis-materialisnya menjadi pondasi penting bagi ekologi politik kontemporer, yang tidak hanya tertarik pada bagaimana masyarakat mengelola lingkungan, tetapi juga pada siapa yang memiliki kendali, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan dalam proses tersebut.

Menimbang berbagai penelitian di bidang ekologi politik yang telah diulas dan kontribusi antropologi dalam pengembangan ekologi politik, penelitian ini mengkombinasikan pendekatan ekologi politik dan antropologi. Sebagaimana menurut Bryant & Bailey (1997:17), meskipun ekologi politik yang berbasis geografi muncul sebagai kritik pada ekologi budaya, bidang penelitian ini tetap mempertahankan hubungan kuat dengan antropologi dan sosiologi. Para ahli ekologi politik telah menjadikan integrasi penelitian lokal bergaya antropologi dengan analisis struktural politik-ekonomi sebagai perhatian utama. Pengaruh antropologi melalui ekologi budaya terhadap ekologi politik tercermin dalam fakta bahwa sejumlah ahli ekologi politik mempunyai hubungan dengan antropologi misalnya Colchester, Hecht, Horowitz, Little, Moore, Schmink atau disiplin ilmu sosiologi yang terkait misalnya Bunker, Guha, Peluso, Redclift.

Menimbang saran dari Bryant & Bailey (1997), penelitian ini menaruh yang lebih besar terhadap bidang penelitian ekologi politik yang relatif terabaikan seperti masalah perkotaan, dalam konteks penelitian ini lingkungan buatan dan kawasan konservasi ex situ yang berada di wilayah perkotaan yaitu Kebun Raya Bogor. Oleh karena itu, penelitian ini di satu sisi merupakan upaya antropologi untuk

berkontribusi pada pengembangan bidang ekologi politik. Di sisi lain, penelitian ini juga merupakan upaya untuk memperkaya penelitian mengenai Kebun Raya Bogor dari sisi sosial-budaya dan ekonomi-politik. Kombinasi pendekatan ekologi politik dan antropologi diharapkan mampu menguraikan hubungan yang kompleks antara kekuatan ilmiah-konservasi, ekonomi-politik, sosial-budaya di Kebun Raya Bogor.

F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, pendekatan ekologi politik digunakan untuk mengidentifikasi masalah fisik dan masalah aktor serta relasi kuasa yang terjalin dalam konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Ekologi Politik Dunia Ketiga. Teori dipilih didasarkan pada lingkungan yang menjadi objek penelitian yaitu, Kebun Raya Bogor merupakan lingkungan yang dibentuk oleh kolonial dan diwariskan kepada Republik Indonesia, salah satu negara dunia ketiga. Pendekatan antropologi juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat sebagai aktor yang terpinggirkan dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor melakukan perlawanan terhadap aktor-aktor tradisional yang dominan.

Dalam buku *Third World Political Ecology* yang ditulis oleh Raymond L.Bryant dan Sinéad Bailey (1997), ekologi politik dunia ketiga diperkenalkan sebagai bidang penelitian baru yang yang menarik dan berkembang pesat dalam ekologi politik. Dalam karya sebelumnya, Bryant (1992) menyatakan bahwa munculnya ekologi politik dunia ketiga sebagai bidang penelitian baru pada tahun 1980an merupakan cerminan dari kebutuhan mendesak akan pendekatan analitis

yang mengintegrasikan pemahaman lingkungan dan politik dalam sebuah konteks meningkatnya masalah lingkungan di dunia ketiga.

Menurut Bryant & Bailey (1997:1), ekologi politik dunia ketiga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas dan terpadu tentang penyebab dan implikasi perubahan lingkungan di dunia ketiga saat ini dalam kontes ekonomi politik. Menurut Bryant & Bailey (1997:5), inti dari penelitian ekologi politik dunia ketiga adalah analisis politik. Sebagaimana asal usul ekologi politik yang muncul sebagai respons terhadap sebagian besar penelitian mengenai masalah lingkungan Dunia Ketiga pada tahun 1970-an yang bersifat apolitis.

Menurut Bryant & Bailey (1997:7), ekologi politik khususnya ekologi politik dunia ketiga masih penting untuk memahami dan mengapresiasi gejolak politik-ekonomi dan krisis lingkungan hidup yang melanda dunia ketiga hingga saat ini. Gejolak tersebut dilatarbelakangi oleh periode pembangunan lingkungan hidup yang panjang dan berakar sejak masa kolonial. Pemerintahan kolonial mewariskan praktik administratif dan politik terpusat dalam upaya pengelolaan masyarakat dan lingkungan. Praktik tersebut juga menimbulkan masalah ketergantungan negara pada eksploitasi sumber daya alam serta degradasi lingkungan. Integrasi warisan kolonial tersebut telah mengkondisikan penggunaan lingkungan dan konflik di masa pascakolonial yang membedakan dunia ketiga dari negara lain.

Pada konteks penelitian ini, lingkungan Kebun Raya Bogor telah dibentuk oleh pembangunan lingkungan hidup sejak masa kolonial belanda. Pada masa ini, pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya Kebun Raya Bogor ditujukan untuk kepentingan ekonomi-politik kolonial yaitu membangun perkebunan kolonial dan

pertanian pribumi. Sejak pendirian Kebun Raya Bogor sebagai institusi ‘s Lands Plantentuin Buitenzorg, pemerintah kolonial telah menjalankan praktik administratif dan politik terpusat di wilayah jajahannya termasuk Kebun Raya Bogor. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mewarisi Kebun Raya Bogor dan menjadikannya objek vital nasional dan barang milik negara. Praktik administratif dan politik terpusat tersebut juga diwariskan kepada pemerintah Republik Indonesia hingga saat ini, terlihat dari keberadaan BRIN, sebagai institusi ilmiah yang terpusat, sekaligus institusi yang mengelola Kebun Raya Bogor.

Masalah ketergantungan negara pada eksploitasi sumber daya alam juga diwariskan hingga saat ini. Pada masa kolonial, negara mengumpulkan akumulasi spesimen tanaman beserta ilmu pengetahuan di Kebun Raya Bogor untuk tujuan pembukaan perkebunan besar yang menguntungkan secara ekonomis serta pengembangan pertanian rakyat. Pada perkembangannya, pemerintah juga menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai pusat konservasi alam yang melahirkan institusi konservasi dan berbagai lingkungan konservasi in-situ. Namun, pada saat ini, negara hanya memandang Kebun Raya Bogor sebagai barang milik negara yang diperuntukan untuk mendulang keuntungan bagi pemasukan negara dalam bentuk PNBP lewat penyelenggaraan program eduwisata.

Menurut Bryant & Bailey (1997:26) para ahli ekologi politik mengkonsepsikan permasalahan lingkungan pada gagasan lingkungan yang dipolitisasi. Inti dari gagasan lingkungan yang dipolitisasi adalah pengakuan bahwa permasalahan lingkungan tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteks politik dan ekonomi dimana permasalahan tersebut diciptakan. Gagasan tersebut digunakan untuk

menguraikan kondisi perubahan lingkungan yang pada dasarnya dipolitisasi saat ini dan sekaligus mempertimbangkan proses politik dan ekonomi yang menimbulkan atau memperburuk permasalahan tersebut.

Bagan 1.
Kerangka Pemikiran

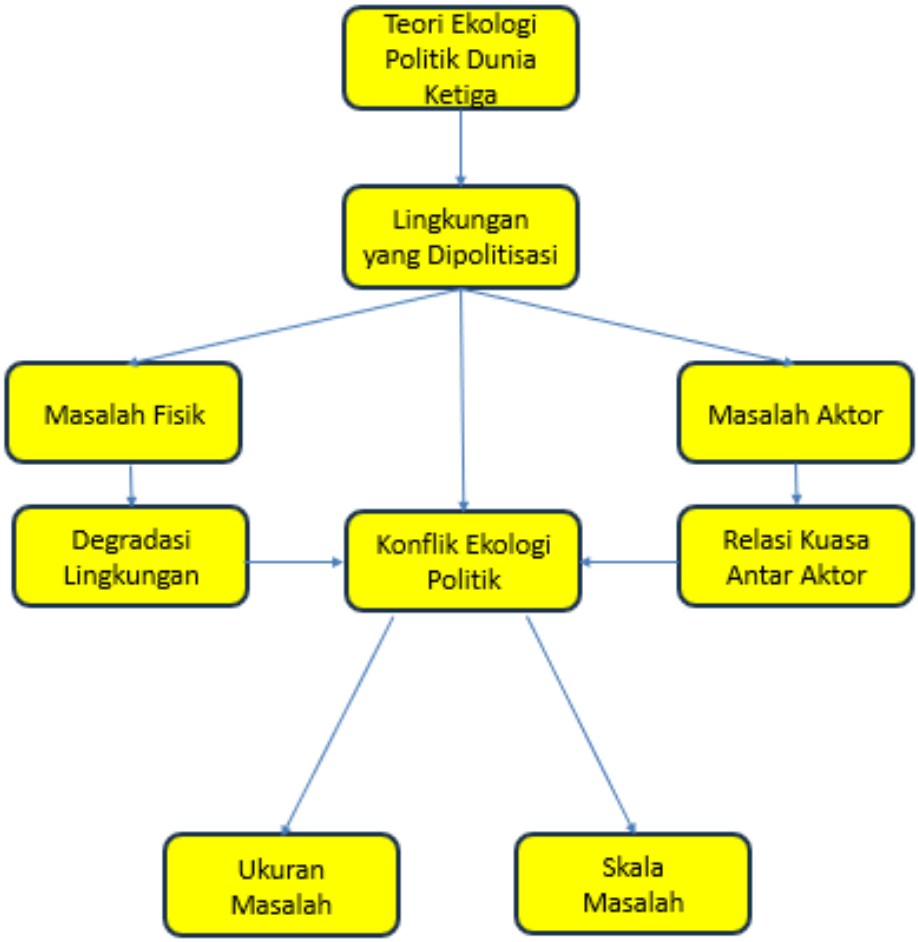

Dalam konteks penelitian ini, Kebun Raya Bogor merupakan lingkungan yang telah dipolitisasi sejak zaman kolonial bahkan konon katanya sejak Kerajaan Sunda masih eksis. Konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor tidak dipisahkan dari konteks politik ekonomi berbagai aktor. Proyek eduwisata GLOW merupakan

proyek ekologi sekaligus proyek ekonomi-politik. Sebagaimana menurut pengamatan Harvey (1993:25), yang dikutip oleh Bryant & Bailey (1997), menyebut bahwa semua proyek (dan argumen) ekologi secara bersamaan merupakan proyek (dan argumen) politik-ekonomi dan sebaliknya.

Namun, Bryant & Bailey (1997:28) menyarankan para ahli ekologi politik agar tidak berfokus pada deskripsi perubahan fisik lingkungan itu sendiri, melainkan pada bagaimana perubahan tersebut berhubungan dengan aktivitas para aktor terkait pengelolaan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, pada konteks penelitian ini, peneliti tidak berfokus pada deskripsi perubahan lingkungan fisik Kebun Raya Bogor. Peneliti berfokus pada proses aktivitas para aktor dibalik konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor dan bagaimana para aktor menggunakan kekuasaannya dalam mendapatkan keuntungan ekonomi-politik dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya Kebun Raya Bogor.

Menurut asumsi sementara peneliti, keterlibatan berbagai aktor dalam konflik tersebut didasari kepentingan ekonomi-politik yang terselubung dibalik wacana yang mereka bawakan. Pada konflik ini, berbagai elemen masyarakat yang terorganisasi melalui LSM dan komunitas bermunculan ke permukaan memperjuangan wacana perjuangan mereka atas nama leluhur. Menurut asumsi sementara peneliti, terlepas apakah perjuangan masyarakat didasari oleh motif sosial-budaya, pada prosesnya tidak akan lepas dari kepentingan ekonomi-politik yang terselubung.

Dalam menganalisis permasalahan lingkungan yang dipolitisasi, Bryant & Bailey (1997:28) tidak menggunakan cara konvensional yang cenderung

melanggengkan dikotomi alam-masyarakat sebagai penyebab permasalahan lingkungan hidup. Bryant & Bailey (1997:28) mengelompokan permasalahan lingkungan yang dipolitisasi berdasarkan dimensinya, yaitu (1) *everyday*; (2) *episodic*; dan (3) *sistemic*. Dimensi tersebut dilihat dari perubahan fisik, tingkat dampak, sifat dampak terhadap manusia, respon politik dan konsep-konsep utama.

Dimensi *everyday* melibatkan perubahan fisik (misalnya penggundulan hutan, salinisasi) yang secara bersamaan berasal dari praktik manusia sehari-hari dan secara tidak merata mempengaruhi praktik-praktik tersebut setiap hari. Dimensi *episodic* mencakup perubahan fisik (misalnya banjir, angin kencang/badai) yang seringkali menimbulkan dampak besar, langsung, dan sangat tidak merata terhadap manusia, namun terjadi secara sporadis dalam kurun waktu tertentu dan sering kali digambarkan, biasanya secara tidak akurat, sebagai bencana alam. Dimensi *sistemic* melibatkan perubahan fisik yang berasal dari aktivitas industri (misalnya dampak nuklir, konsentrasi pestisida dalam rantai makanan manusia) yang berpotensi sama dalam dampaknya terhadap manusia.

Berdasarkan pemikiran Bryant & Bailey (1997), perubahan fisik lingkungan hidup Kebun Raya Bogor akibat proyek GLOW termasuk permasalahan dimensi *sistemic,* yang melibatkan perubahan fisik Kebun Raya Bogor akibat aktivitas industri pariwisata. Proyek GLOW beresiko berdampak umum pada ekosistem Kebun Raya Bogor dan Masyarakat Kota Bogor dengan tingkat dampak yang bertahap dan belum tentu dirasakan, tetapi juga berpotensi terjadi secara tiba-tiba. Konsep utama yang muncul pada masalah konflik ini yaitu, resiko. Sedangkan respon politik yang muncul berupa ketidakpercayaan pada para ahli resmi. Dalam

konteks ini, respon politik yang muncul yaitu, ketidakpercayaan masyarakat bogor dan Pemkot Bogor pada pakar BRIN selaku aparatus ilmiah, yang merupakan perpanjangan tangan negara.

Menurut Bryant & Bailey (1997:32) memahami permasalahan lingkungan yang dipolitisasi berarti merefleksikan bagaimana lingkungan tersebut terbentuk dan bagaimana perubahannya pada skala yang berbeda-beda, baik dalam kaitannya dengan masalah fisik maupun aktornya. Suatu masalah fisik sering kali dikaitkan terutama dengan salah satu skala diantaranya lokal, regional dan global. Menurut Delfi & Oktayanty (2022), Skala dalam konteks ekologi politik merefleksikan relasi antara manusia dan lingkungan dengan latar kepentingan ekonomi-politik yang menyertainya.

Menurut Bryant & Bailey (1997:32), pemahaman masalah fisik perubahan lingkungan hidup pada skala yang berbeda-beda tak akan memadai tanpa memahami kompleksitas situasi dimana berbagai aktor juga terlibat pada skala yang berbeda-beda secara simultan. Salah satu pihak mungkin terlibat berkontribusi, terdampak, atau berupaya menyelesaikan masalah tersebut pada skala yang berbeda-beda. Namun pada kenyataannya, satu pihak biasanya terlibat dalam beberapa atau bahkan semua hal dalam suatu masalah lingkungan. Pada konteks penelitian ini, masalah konflik GLOW ini bermula dari skala lokal di tingkat pemerintah daerah, namun pada perkembangannya masalah ini kemudian berkembang menjadi skala nasional. Berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor dan konflik yang terjadi merupakan aktor dari institusi di tingkat daerah hingga institusi di tingkat pusat.

Menurut Bryant & Bailey (1997:37), relasi yang tidak setara antar aktor merupakan faktor kunci dalam memahami pola interaksi manusia-lingkungan dan permasalahan lingkungan terkait yang, secara agregat, merupakan krisis lingkungan hidup di dunia ketiga. Relasi yang tidak setara tersebut pada gilirannya harus dikaitkan dengan kekuasaan yang dimiliki masing-masing aktor, baik dalam skala besar maupun kecil, dan yang mempengaruhi hasil konflik lingkungan hidup di Dunia Ketiga. Oleh karena itu, bagi para ahli ekologi politik, kekuasaan merupakan sebuah konsep kunci dalam upaya menentukan topografi lingkungan yang dipolitisasi.

Menurut Bryant & Bailey (1997:37) perlu pemahaman yang lebih inklusif tentang kekuasaan yang mencakup pertimbangan material dan non-material serta ketidakstabilan kekuasaan itu sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, Bryant & Bailey mengajukan tiga pertanyaan yang saling terkait: apa saja berbagai cara dan bentuk yang digunakan oleh satu aktor untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan aktor lain, bagaimana hubungan kekuasaan terwujud dalam lingkungan fisik, dan mengapa aktor-aktor yang lebih lemah mampu melawan aktor-aktor yang lebih kuat.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, peneliti memetakan posisi dan kepentingan para aktor dalam konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor. Peneliti kemudian menguraikan berbagai cara dan bentuk yang digunakan oleh oleh para aktor dalam melegitimasi tindakannya untuk mencapai kepentingannya. Peneliti juga menyorot bagaimana relasi kekuasaan yang tidak setara antar aktor dan bagaimana ketimpangan relasi kekuasaan tersebut mewujud dalam lingkungan fisik

Kebun Raya Bogor. Peneliti kemudian menggali mengapa dan bagaimana elemen masyarakat sebagai aktor yang lebih lemah melakukan perlawanan terhadap negara dan swasta sebagai aktor-aktor yang lebih kuat.

G. Metode Penelitian

Penelitian di bidang ekologi politik ini tidak meninggalkan ciri khas tradisi antropologis, yaitu metode etnografi dan dimensi etika antropologis. Metode penelitian ini juga dilakukan oleh Hecht (1985), Little & Horowitz (1987), Bassett (1988), yang mengintegrasikan penelitian lokal bergaya antropologi dengan analisis struktural politik-ekonomi (Bryant & Bailey, 1997:12). Metode etnografi memungkinkan peneliti memahami klaim masyarakat lokal atas legasi leluhur mereka di Kebun Raya Bogor. Metode etnografi juga memungkinkan peneliti menelusuri bagaimana memori kolektif, kepercayaan lokal, praktik ritual, dan narasi lokal digunakan sebagai alat perlawanan elemen masyarakat terhadap dominasi negara dan swasta dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor. Dimensi etika antropologis mampu mendorong refleksi kritis tentang ketidaksetaraan global dan keadilan sosial serta mendesak para peneliti dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan implikasi etis dari kebijakan dan praktik lingkungan dan solusi yang adil dan inklusif (Nasution & Anggraeni, 2020).

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Creswell (2014:4), ada tiga jenis penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Pada dasarnya, tiga metode penelitian ini tidak bertentangan sebagai dikotomi atau antitesis dalam perkembangan historisnya. Menurut Creswell

(2014:6), dalam merencanakan suatu penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan titik temu paradigma penelitian, rancangan penelitian, metode, dan rencana penelitian. Pemilihan atas suatu pendekatan penelitian juga didasarkan pada masalah penelitian (*research problem*), pengalaman pribadi peneliti, dan target atau sasaran pembacanya.

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna dari realitas sosial dari pengelolaan Kebun Raya Bogor. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2014:254) penelitian kualitatif adalah cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna sosial apa yang dilakukan oleh sejumlah orang atau sekelompok orang yang dianggap memiliki masalah sosial atau kemanusiaan.

Jenis rancangan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi, suatu rancangan penelitian yang paling khas dari antropologi. Menurut Creswell (2014:19), etnografi adalah jenis penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi dimana peneliti melihat pola tindakan, bahasa, dan perilaku suatu kelompok kebudayaan di lingkungan alamiahnya dalam periode waktu yang cukup lama. Namun dalam konteks tujuan penelitian ini, etnografi digunakan untuk menyelidiki pola perilaku, pengetahuan, dan praktik kekuasaan oleh berbagai aktor terkait konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor.

2. Lokasi Penelitian

Menurut Creswell (2014):253, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh peneliti dalam prosedur pengumpulan data. Pertama, peneliti perlu

mengidentifikasi lokasi dan partisipan penelitian beserta jumlah sampelnya. Pada penelitian kualitatif, lokasi dan partisipan penelitian serta dokumen atau materi visual tidak ditentukan (*random sampling)*, tetapi secara sengaja dan penuh perencanaan (*purposefully select*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan lokasi dan partisipan penelitian. Lokasi yang dipilih yaitu Kawasan Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor karena lokasi ini merupakan lingkungan yang dipermasalahkan pada penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Menurut Spradley (1997:63), kriteria informan yang baik yaitu terenkulturasi penuh, terlibat langsung, informan berasal dari suasana budaya yang tidak dikenal peneliti, memiliki cukup waktu dan dapat memberikan keterangan yang non analitis. Informan kunci pada penelitian ini juga dipilih secara *purposive sampling* yaitu, pimpinan atau perwakilan dari setiap aktor yang terlibat dalam konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor. Berbagai aktor tersebut diantaranya yaitu pengelola Kebun Raya Bogor (BRIN dan PT. MNR), elemen masyarakat (Komunitas dan LSM), Pemerintah Kota Bogor dan LPPM IPB University.

Sebelum turun ke lapangan peneliti mengurus semua surat perizinan penelitian melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Untuk dapat terhubung dengan informan, peneliti menghubungi kontak, email, *Whatsapp*, *Linkedin*, dan akun sosial media milik institusi atau pribadi informan. Peneliti kemudian mengatur jadwal dan membuat janji temu atau zoom meeting dengan informan.

Tabel 1.
Informan Penelitian

No	Nama dan Gelar	Jenis Kelamin	Jabatan	Afiliasi
1.	Endang Sumitra, S.H	Laki-laki	Kepala Sub-Bagian Rumah Tangga Istana Kepresidenan Bogor	Kementerian Sekretariat Negara, Konsil Kota Pusaka
2.	Prof. Dr. Dipl-Ing. Usep Soetisna, M.Sc	Laki-laki	Kepala Kebun Raya Bogor	LIPI (sekarang BRIN), Konsil Kota Pusaka
3.	Wihermanto, S.Si	Laki-laki	Kurator dan Koordinator Layanan Ilmiah Kebun Raya Bogor	Badan Riset dan Inovasi Nasional
4.	Drs. Taufik Hasunna, S.Hum	Laki-laki	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bogor	Pemerintah Kota Bogor, Konsil Kota Pusaka
5.	Abdurrahman	Laki-laki	Juru Kunci Kompleks Makam Keramat Ratu Galuh Mangku Alam	Kelompok Budayawan/Penggiat Kepercayaan?
6.	Dayan D. Layuk Allo	Laki-laki	Prinsipal Konsil Kota Pusaka	Konsil Kota Pusaka
7.	Abah Wawan Purnawan	Laki-laki	Praktisi Budaya (Pelukis Spiritual dan Ahli Spiritual)	Masyarakat Peduli Cagar Budaya
8.	Santi Chintya Dewi, S.H	Perempuan	Advokat Masyarakat Adat, Ketua Masyarakat Peduli Cagar Budaya	Masyarakat Peduli Cagar Budaya
9.	Putra Sungkawa	Laki-laki	Praktisi Budaya (Silat), Ketua Pemuda Sunda Menggugat	Pemuda Sunda Menggugat
10.	Prof. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS	Laki-laki	Profesor Ekologi Politik IPB University	IPB University
11.	Dr. Mohammad Fathi Royyani, M.Si	Laki-laki	Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
12.	Dr. Reza Amarta Prayoga, M.Si	Laki-laki	Peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa Dan Konektivitas BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional

Sumber : Data Primer 2025

Sebelum melakukan wawancara, peneliti berupaya memetakan posisi dan kepentingan informan dalam konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor sehingga peneliti dapat menyesuaikan draft pertanyaan wawancara dan menghindari sikap waspada informan. Dengan memahami latar belakang informan dan memetakan posisinya, peneliti mampu membangun *rapport* dengan informan sehingga informasi yang didapat lebih mendalam dan akurat. Sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta izin kepada informan untuk merekam dan mendokumentasikan bukti wawancara. Setelah melakukan wawancara, peneliti berupaya meminta kontak informan lain yang belum ditemukan kontaknya oleh peneliti. Namun dalam proses penelitian, peneliti tidak berhasil mewawancarai semua target informan karena keterbatasan akses, waktu, dan kesibukan informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memandu proses pengumpulan data, peneliti menggunakan catatan lapangan untuk mencatat informasi deskriptif dan reflektif. Catatan ini menampilkan jadwal kegiatan pengumpulan data guna membandingkan catatan ini dengan pemanfaatan waktu ketika mentranskrip dan menganalisis data. Catatan ini mencatat detail-detail observasi lapangan dan rentetan kejadian dari pemikiran, perasaan, pengalaman, dan persepsi peneliti selama proses penelitian.

Menurut Creswell (2014:254), ada empat jenis strategi dalam prosedur pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan materi audio-visual. Dalam mengumpulkan data terkait pengetahuan, persepsi dan praktik kekuasaan berbagai aktor dalam konflik ekologi politik Kebun Raya

Bogor, peneliti menggunakan semua strategi dalam prosedur pengumpulan data tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap sehingga dapat menghasilkan gambaran yang holistik.

Teknik pengumpulan data yang pertama, yaitu observasi. Menurut Creswell (2014:254), observasi adalah ketika peneliti turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada konteks penelitian ini, teknik observasi yang digunakan yaitu observasi partisipatif, dimana peneliti mengunjungi Kebun Raya Bogor dan mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu disana. Observasi berlangsung selama lima bulan, dimana peneliti melaksanakan dua kali observasi dalam satu pekan yakni *weekdays* dan *weekend,* untuk membandingkan tingkat keramaian aktivitas pengunjung pada hari biasa dan hari libur. Peneliti juga menggunakan buku catatan dan ponsel sebagai alat bantuan daya pengamatan.

Teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu wawancara. Menurut Creswell (2014:254), wawancara adalah ketika peneliti melakukan pertemuan perorangan atau *focus group* dengan informan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk untuk menggali pengetahuan, persepsi dan praktik kekuasaan yang dilakukan oleh berbagai aktor, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara berencana. Wawancara informan kunci dilakukan beberapa kali secara terjadwal di waktu dan tempat yang telah disepakati oleh peneliti dan informan kunci. Hal ini dilakukan menimbang kesibukan informan. Peneliti menggunakan buku catatan dan ponsel sebagai alat bantuan untuk wawancara.

Teknik pengumpulan data yang ketiga, yaitu dokumentasi. Pada konteks penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud yaitu pengumpulan dokumen-dokumen publik (koran, majalah, berita online, makalah, laporan, peraturan perundang-undangan) dan privat (buku harian, diari, surat, *e-mail, group whatsapp*) terkait Kebun Raya Bogor. Peneliti menganalisis dokumen pribadi dan publik yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk menangkap pengetahuan, persepsi dan praktik kekuasaan yang dilakukan berbagai aktor yang terwujud dalam bentuk tertulis.

Teknik pengumpulan data yang keempat, yaitu materi audio visual. Pada konteks penelitian ini, materi audio visual yang dimaksud yaitu pengumpulan data berupa foto, audio, video ataupun objek seni terkait Kebun Raya Bogor yang ada di lokasi penelitian (papan informasi, *videotron*, spanduk, *banner* dll), arsip dan perpustakaan serta di media sosial. Peneliti menganalisis materi audio visual yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk menangkap pengetahuan, persepsi dan praktik kekuasaan yang dilakukan berbagai aktor dalam bentuk audio visual. Sebelum mengumpulkan data primer, peneliti terlebih dahulu telah meninjau berbagai data sekunder dari studi pustaka di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Pertanian Bogor, Perpustakaan Daerah Kota Bogor, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan KITLV Leiden Jakarta.

5. Analisis Data

Menurut Creswell (2014:260), analisis data merupakan proses yang terus berlangsung secara berkelanjutan dalam tahapan penelitian kualitatif. Dalam

penelitian kualitatif, analisis data berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data dan penulisan temuan. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang prosesnya bertahap. Misalnya peneliti dapat menganalisis data wawancara yang dikumpulkan sebelumnya ketika wawancara sedang berlangsung kemudian menuliskan memo yang dimasukkan sebagai narasi untuk membangun struktur laporan akhir.

Idealnya menurut Creswell (2014:262), peneliti harus mengkombinasikan langkah-langkah umum dan strategi khusus dalam analisis data kualitatif. Langkah umum meliputi: pengolahan dan penyiapan data, pembacaan awal informasi, peng-*coding*-an data, deskripsi detail kode-kode, analisis tematik kode, penggunaan program komputer, penyajian data dalam tabel, grafik, dan gambar, serta interpretasi terhadap data penelitian. Strategi khusus menyesuaikan dengan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian etnografi yang melibatkan deskripsi detail mengenai *setting* atau individu-individu tertentu.

Pada tahap pengolahan dan penyiapan data hingga pembacaan awal informasi, peneliti memfokuskan pada sebagian data yang relevan dan menggabungkannya menjadi sejumlah kecil tema antara lima sampai tujuh tema. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memfokuskan pada sebagian data yang relevan dan menggabungkannya menjadi lima tema aktor yaitu: lingkungan, posisi, kepentingan dan relasi kuasa. Hal ini perlu dilakukan karena menurut Creswell (2014):260, sebelum analisis data, peneliti perlu melakukan segmentasi dan pemilahan data karena tidak semua data dapat digunakan untuk analisis.

Setelah kelima tema data didapatkan, peneliti kemudian menggunakan program *software Nvivo* dalam tahap peng-coding-an data hingga penyajian data. Hal ini dilakukan karena menurut Creswell (2014:261), pemberian kode secara manual memakan waktu dan tenaga, bahkan untuk data dari sedikit individu. Oleh karena itu program *software* dapat digunakan untuk membantu peneliti memberi kode data serta menyusun, menyortir, dan mencari informasi di database dalam bentuk teks atau gambar secara lebih cepat dan efisien.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan studi literatur yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mereview berbagai penelitian terdahulu tentang masalah perkebunrayaan di tingkat global dan di tingkat nasional, terutama Kebun Raya Bogor. Peneliti kemudian mengidentifikasi masalah penelitian dan menyusun kerangka teoritis. Peneliti memperkaya bacaan teoritis dan melakukan diskusi teoritis dengan pembimbing. Peneliti juga membaca berbagai literatur penunjang untuk memperluas dan memperdalam pemahaman tentang objek kajian.

Peneliti kemudian melakukan observasi dan wawancara awal di lokasi penelitian untuk memetakan berbagai aktor dan diskursus pada konflik ekologi politik Kebun Raya Bogor. Setelah menyelesaikan proposal penelitian, membuat rencana turun lapangan dan mengurus perizinan penelitian dan permohonan wawancara, peneliti melakukan pengumpulan data primer menggunakan pendekatan etnografi, dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi

di lokasi penelitian serta dokumentasi sketsa, spesimen, media, dan dokumen milik informan.

Setelah selesai mengumpulkan data hingga data yang diperoleh jenuh, peneliti menganalisis data dengan metode tematik. Setiap hasil wawancara dan catatan observasi dikodekan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul, yaitu aktor, lingkungan, posisi, kepentingan dan relasi kuasa. Hasil analisis disusun dalam laporan skripsi mengikuti pedoman dan sistematika penulisan skripsi oleh Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA